



Jurnal wisataMuh

https://jurnal.umt.ac.id/public/journals/40/homepagelimage_en_US.jpg

Pengembangan Desa Wisata Nelayan Dengan Pendekatan CBT dan Blue Economy di Desa Ketapang

Tiktik Dewi Sartika

tiktik.d.sartika@gmail.com

Program Studi Pariwisata, Fakultas Parinkraf, Universitas Muhammadiyah Tangerang

ABSTRAK

Penataan kawasan di Desa Nelayan Ketapang, Kecamatan Mauk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui upaya-upaya pembangkitan potensi masyarakat setempat yang didukung oleh infrastruktur kawasan yang memadai. Kesepakatan warga setempat menjadikan Desa Ketapang sebagai Destinasi Wisata, merupakan komitmen kolektif untuk diwujudkan dan didukung oleh semua pihak. Kini Ketapang telah dicanangkan sebagai kawasan Aquaculture. Namun potensi wisata yang bisa digali untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat belum dimaksimalkan. Keinginan masyarakat terlibat dalam pewujudan Ketapang menjadi Destinasi Wisata Baru yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, kultural dan ekologis di Banten dapat dijumpai melalui gagasan pengembangan Desa Wisata Nelayan dengan menerapkan prinsip Community-Based Tourism dan Blue Economy. Makalah ini bermaksud untuk menggali potensi dan kendala Desa Ketapang untuk dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata Nelayan dengan pendekatan Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Blue Economy serta mengetahui strategi untuk menwujudkannya.

Kata Kunci: Community-Based Tourism, Blue Economy, Inovasi, Desa Wisata

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata diperkirakan menyumbang 10% GDP Dunia [1] dan membuka peluang untuk terbukanya lapangan kerja. Bahkan dikatakan 1 dari 5 pekerjaan baru sudah hampir dapat dipastikan berasal dari industri pariwisata [1]. Pariwisata Bahari dan Pesisir secara global

diperkirakan pada tahun 2030 akan menyumbang 26% dari total industri berbasis laut. Pesisir dan laut Indonesia merupakan salah satu kawasan yang kaya akan potensi sumberdaya alam dan juga potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Di Indonesia, sektor pariwisata menyumbang 5,25% terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dan melihat tren pada 2018 yang menunjukkan peningkatan tren tahunan sebesar 15,4% yang berarti potensinya masih cukup tinggi. Demikian pula bila kita berbicara pengembangan kawasan pesisir untuk keperluan pariwisata di Indonesia maka tentunya sangat tinggi nilai potensinya. Garis pantai Indonesia sebagai salah satu terpanjang di dunia masih belum dikelola secara optimal. Pariwisata sebagai sektor dengan *multiplier effect*, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat serta pembangunan wilayah di daerah wisata yang bersangkutan.

Kabupaten Tangerang memiliki setidaknya 7 kawasan pesisir yang sebagian besar merupakan kawasan Wisata Bahari dan Wisata Mangrove dengan pengelolaan yang berbeda-beda. Ada yang secara mandiri dikembangkan oleh masyarakat, ada juga yang merupakan pengembangan dari pemerintah, serta ada yang baru akan dikembangkan sebagai Desa Wisata.

Salah satu program pembangunan Kabupaten Tangerang adalah program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Selain itu juga ada program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Pemukiman Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) termasuk di dalamnya perbaikan pemukiman di kawasan nelayan [2].

Kabupaten Tangerang memiliki potensi bahari yang dapat dilihat dari garis pantai sepanjang 50 km dari Pantai Dadap sampai Pantai Kronjo. Terdapat 7 kecamatan, yaitu Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Kronjo, Sukadiri, Kemiri dan Mauk.

Di Kecamatan Mauk terdapat Desa Nelayan Ketapang. Desa di pesisir pantai Kecamatan Mauk ini merupakan salah satu target rehabilitasi dan revitalisasi untuk menjadi Desa Wisata Nelayan dan Wisata Mangrove (Aquaculture) sesuai roadmap oleh Bappeda Kabupaten Tangerang.

Infrastruktur di lapangan hingga kuartal ketiga tahun 2020 sudah mencapai 70% dan pada bulan juni tahun 2021 penataan kawasan pemukiman nelayan sudah berjalan hingga 50%, kawasan ini mulai menjadi daya tarik masyarakat sekitar karena ditata sedemikian apik lengkap untuk ekowisata dan *leisure*-nya dilengkapi tempat pemancingan serta jogging track.

Minat masyarakat sudah cukup tinggi, dalam sehari khususnya pada akhir minggu pengunjung dapat mencapai 2000 sehari (sebelum pandemi covid-19), bahkan sudah muncul tempat dan pengelola parkir liar.

Diketahui di lapangan bahwa pemerintah sedang menggagas komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya unsur Kecamatan, Pokdarwis, LSM, Pengembang, dan tokoh dan warga untuk membicarakan pengelolaan kawasan wisata. Diketahui juga belum ada program pengembangan masyarakat yang terencana untuk mengisi Desa Nelayan Tersebut. Hal ini membuka peluang untuk Universitas Muhammadiyah melakukan kegiatan untuk melengkapi program Gerbang Mapan tersebut.

Melihat cukup aktifnya masyarakat dan keterlibatan yang baik antara unsur camat, Pokdarwis, LSM, dan warga, merupakan kondisi awal yang sangat baik untuk dikembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Nelayan Ketapang atau *Community-Based Tourism* (CBT). CBT berpotensi untuk menjadikan pariwisata lebih berkelanjutan dan resilien terhadap berbagai tantangan baik itu internal (potensi konflik) maupun eksternal (pandemi, bencana, kerusakan iklim, dll).

TINJAUAN TEORI

Community-Based Tourism (CBT)

Menurut ASEAN CBT Standard, definisi CBT adalah aktivitas pariwisata yang dimiliki dan dioperasikan komunitas, dikelola atau dikoordinasikan oleh level masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan komunitas melalui dukungan pada mata pencaharian yang berkelanjutan yang juga melindungi tradisi sosial kultural yang berharga tanpa merusak sumber daya alam dan tradisi yang sudah turun temurun [3].

CBT menekankan pada pelibatan masyarakat seluas-luasnya, memberdayakan masyarakat dan otomatis meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankannya. Namun tetap menekankan kemampuan masyarakat untuk mandiri. Artinya masyarakat diberdayakan untuk dapat menentukan kegiatan, pendekatan, serta langkah-langkah pelaksanaan implementasi.

CBT umumnya diterapkan pada *adventure tourism*, *cultural tourism*, *eco-tourism*, dan *agri-tourism*, yang menitik beratkan pada produk lokal dan menjaga lingkungan dan sumberdaya kultural, mendukung interaksi setara dan saling menguntungkan antara *host-guest*. Kawasan Bahari dan Pesisir merupakan jenis kawasan yang sangat sesuai untuk menerapkan konsep CBT. Banyak studi yang mengkaji upaya penerapan CBT untuk kawasan pantai, seperti Palawan di Filipina [4] dan bahkan di Swedia. Di Indonesia antara lain di Pantai Clungup – Malang [6]. Umumnya menekankan tantangan tersulit dalam penerapan CBT adalah dalam hal *bottom-up* dari masyarakat karena memerlukan proses yang lama mulai dari membangun kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas, hingga masyarakat dapat menjadi mandiri. Namun hal ini sebanding dengan keberlanjutan ekonomik dan ekologis dan ketahanan sosial kultural yang akan terbangun bila berhasil.

Desa Wisata

Desa wisata merupakan konsep pengelolaan potensi kultural desa menjadi tujuan wisata melalui pengelolaan menyeluruh antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang lainnya yang dikemas menyatu dengan kehidupan sehari-hari penduduk setempat [11]. Indonesia memiliki 83.931 desa dan 1.734 (2%) merupakan desa wisata, artinya masih banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh 98% desa lainnya, di antaranya untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata.

Sektor pariwisata memiliki potensi *multiplier effect* dalam kaitannya membuka lapangan kerja dan membangun kemandirian Desa, maka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia sangat mendorong desa-desa yang memiliki potensi wisata untuk mengembangkan desanya menjadi Desa Wisata (Kemenparekraf, 2021). Dalam momentum tersebut, maka gagasan pengembangan Desa Wisata Nelayan di Desa Ketapang sudah sangat tepat dan perlu segera didukung dan diwujudkan.

Beberapa kriteria harus dipenuhi untuk sebuah desa dapat menjadi Desa Wisata, antara lain; SDM, komoditas pertanian/peternakan, sumber daya alam, kelembagaan, aset sosial, spiritual budaya, finansial, fisik infrastruktur, sumber daya informasi, dan jaringan [11]. Penyelenggaraan Desa Wisata harus selaras dengan kebijakan lokal (Peraturan Bupati atau Peraturan Gubernur, dll) maupun nasional, khususnya Undang-undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009. Dengan demikian potensi pengembangan Desa Wisata dapat distudi dari unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

Pengembangan Desa Wisata memperhatikan komponen sebagai berikut:

1. Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas.
2. SDM, Masyarakat, dan Industri.
3. Branding, Advertising, and Selling.

Adapun pelaksanaan di lapangan dapat menerapkan konsep dalam Community Based Tourism yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat yang tinggi agar kegiatan ini memiliki dampak yang luas dan berkelanjutan.

Blue Economy

Tantangan pembangunan saat ini adalah menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan kelestarian alam. Oleh karena itu model ekonomi yang turut menjaga keberlanjutan alam merupakan model yang lebih dipilih. Konsep green mengimplikasikan label teknologi hijau yang pada akhirnya memunculkan biaya yang lebih mahal. Sehingga sebuah gagasan inovatif dari seorang Gunter Pauli memadukan kewirausahaan dengan keberlanjutan ekosistem lahir, yaitu Blue Economy [12]. Secara singkat konsep *Blue Economy* berupaya mengembangkan potensi ekonomi dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi yang ada tetapi dengan tetap menjaga planet tetap biru dengan prinsip zero-waste dan closed-cycle.

Sebagai ilustrasi, sebuah kafe kopi mengambil 1% kopi dan menyisakan 99% ampas. Ampas dimanfaatkan untuk menumbuhkan jamur yang dapat diolah menjadi kuliner, dan limbahnya dapat dijadikan pakan ternak dan ikan, dan seterusnya.

Konsep ini dapat diterapkan menjadi alternatif pengembangan kegiatan ekonomi di level desa dengan mengerahkan sumber daya lokal yang tersedia. Selain meningkatkan pendapatan, juga membuka lapangan kerja, dan menjaga lingkungan.

ANALISIS

Ketapang adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten, Indonesia.

Dalam laporan kajian pengembangan wisata terpadu diketahui bahwa Ketapang saat ini menjadi bagian dari program Gerbang Mapan dan pelaksanaan infrastrukturnya telah mencapai 70% berdasarkan materi paparan unsur Bappeda. Hal ini menandakan pada Tahun 2021 infrastruktur sudah selesai terbangun. Hal ini seharusnya diikuti dengan diadakannya kegiatan masyarakat untuk mengisi sehingga Desa Ketapang menjadi Desa Wisata Nelayan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah dan juga diharapkan oleh masyarakat yang diketahui dari forum FGD yang diikuti oleh Tim dari Universitas Muhammadiyah Tangerang.



Gbr. 1. FGD Berbagai Elemen

Faktor Pendukung

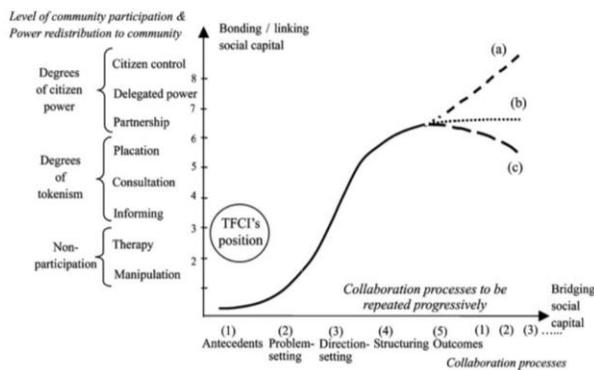
Dari FGD yang dilaksanakan pada awal Januari 2020 diketahui bahwa stakeholders dari unsur pemerintah (Bappeda, Camat, Dinas Perikanan, dan Kementerian PUPR) sangat mendukung dan siap mengakomodasi keinginan masyarakat. Demikian pula unsur Pokdarwis sudah ada dan bisa diberdayakan. Terdapat LSM yang aktif dan siap mendukung dalam pengelolaan sampah. Unsur-unsur Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, Relawan Mangrove, Nelayan, dan masyarakat Rukun Tetangga juga tampak antusias untuk dapat membuat suatu kegiatan kepariwisataan di Desa Ketapang ini. Sehingga ini merupakan modal sosial dan merupakan faktor pendukung yang besar untuk dapat diarahkan menjadi Desa Wisata [13].

Selain itu infrastruktur yang sudah jadi merupakan modal fisik yang sangat kuat karena sudah ada kawasan yang tertata.

Selain itu terdapat potensi kultural dan historis yang bisa dikembangkan karena diketahui bahwa pahlawan nasional Otto Iskandar terbunuh di kawasan Desa Ketapang dan terdapat kemungkinan akan dibangun monumen yang dapat menjadi landmark historis yang menarik, selain penggalian budaya nelayan setempat.

Kenyataan di lapangan bahwa unsur Kecamatan sangat aktif dan mendukung kegiatan ini. Diketahui dari komunikasi bahwa Kecamatan telah mengalokasikan pendidikan dan pelatihan bila diperlukan untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan CBT yang utama adalah pelibatan masyarakat. Dalam Okazaki [4] pelibatan masyarakat itu ada setidaknya ada 8 tingkatan, mulai dari yang terendah, di mana masyarakat hanya menjadi penonton dan tidak memiliki hak pengambilan keputusan, hingga paling tinggi yaitu masyarakat memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pariwisata yang akan dilaksanakan.



Gbr 2. Tangga Keterlibatan Masyarakat [4]

Pelibatan masyarakat mulai dari tahap awal (anteseden) kemudian pencarian solusi, hingga pelaksanaan dan dihasilkannya outcome yang diharapkan [4]. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat sudah berada di tahap mana, tentunya di awal kegiatan perlu dilakukan suatu survey yang dimonitor pada setiap tahap pelaksanaan sehingga keterlibatan ini dapat menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang berbasis masyarakat.

Selanjutnya penetapan kegiatan yang sesuai dengan potensi yang dikembangkan untuk Desa Ketapang.

Mata Pencaharian penduduk Desa Ketapang sebagian besar atau 86% adalah nelayan dan dari jumlah seluruh nelayan tersebut 90% diantaranya adalah nelayan rajungan, dengan alat tangkap berupa jaring dan bubu. Diketahui bahwa jenis tangkapan nelayan ini adalah komoditi ekspor. Hal ini dapat menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan yaitu Seafood khususnya produk rajungan.

Sektor nelayan ini dapat dimaskimalkan untuk dijadikan berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Mulai dari pengelolaan seafood menjadi kuliner, atraksi kehidupan nelayan, atraksi kegiatan di tambak ikan, hingga pengolahan limbah dan pembuatan cinderamata.

Dengan pendekatan CBT, seluruh elemen warga dapat mengambil peran dalam kegiatan di atas sesuai kapasitas mereka, atau dikembangkan kapasitas-kapasitas yang menunjang untuk kegiatan tersebut di atas.

Dari sektor kuliner, pemberdayaan perempuan dan Ibu-ibu akan sangat mendominasi dan ini merupakan nilai tambah yang baik karena Ibu-ibu Rumah Tangga yang umumnya tidak bekerja akan dapat penghasilan tambahan. Kegiatan yang juga melibatkan anak-anak di waktu luang untuk membuat cinderamata dan mengembangkan permainan anak-anak nelayan. Serta pemuda dapat dilibatkan dalam promosi kuliner dibantu dengan IT yang mencukupi serta pelatihan-pelatihan menjadi guide yang baik, sehingga standar pelayanan dan pengalaman yang ditawarkan di Desa Wisata Nelayan Ketapang akan baik sebagaimana 10 prinsip CBT Standar ASEAN.

Ditinjau dari langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengakomodasi dan memfasilitasi forum-forum warga mengindikasikan upaya pendekatan partisipatif terhadap masyarakat untuk menjangkau seluruh lapisan, sehingga setiap komponen masyarakat akan turut mengambil peran sekaligus memegang tanggung jawab atas segala pelaksanaan pengelolaan kegiatan di kawasan tersebut.

Masyarakat Nelayan Ketapang yang terbuka akan gagasan dari kelompok lain serta aktif dalam mengikuti forum merupakan modal sosial yang besar untuk meningkatkan harapan dapat dilaksanakannya pengembangan pariwisata berbasis kawasan sebagaimana [4]. Karena apabila terjadi perbedaan dan konflik maka akan cenderung dapat dikomunikasikan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan penyelesaian.

Salah satu yang menjadi tantangan di lapangan adalah potensi konflik di antara pelaku-pelaku di masyarakat seperti pengelolaan parkir dan keamanan. Dengan pendekatan CBT maka diharapkan masyarakat bahu-membahu dapat mengatasi konflik internal maupun konflik warga dengan pendatang di kemudian hari. Konsepnya saling mengawasi untuk kepentingan bersama.

Faktor berikutnya adalah komitmen aparaturnya Pemerintah Desa dapat menjadi faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan kegiatan melalui kebijakan yang mendukung pengembangan kawasan. Seperti program eduwisata melalui sekolah serta kebijakan pendukung lainnya yang mendukung keamanan di kawasan, misalnya larangan merusak kawasan dengan membuang sampah atau merusak taman dan bangunan tanpa.

Kebijakan insentif bagi UKM di kawasan untuk promosi akan menarik pelaku ekonomi di kawasan.

Dukungan perlengkapan nelayan dapat diperoleh dari dana desa ataupun dari pelibatan sumber dana lain yang memungkinkan agar terjadi pembenahan dan peningkatan performa nelayan.

Dukungan teknologi juga sangat penting untuk pengolahan produk yang dapat dikembangkan agar higienis dan berkualitas, serta untuk promosi melalui IT.

Terakhir, faktor terpenting adalah kualitas SDM masyarakat baik nelayan maupun masyarakat sekitar kawasan. Meski demikian dapat dilakukan berbagai pendidikan dan pelatihan baik untuk keluarga nelayan, serta warga masyarakat di kawasan Desa Wisata sehingga penyerapan ilmu dan teknologi yang mendukung pengembangan kawasan wisata lebih cepat

lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan Pusat Pengembangan Masyarakat yang dibangun di Desa Ketapang.

Pelatihan dan pendidikan untuk mengisi kegiatan ekonomik masyarakat di dalam Desa Wisata ini dapat dengan menerapkan Blue Economy, misalnya membuat tempat kuliner dan cenderamata yang mengindahkan prinsip-prinsip sumberdaya lokal, zero-waste, dan closed-cycle. Dengan memaksimalkan potensi yang ada di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya di mana terdapat pusat pengembangan teknologi yaitu BPPT sehingga dapat digali pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan ekonomik tersebut yang selaras dengan prinsip Blue Economy.

Untuk Atraksi Desa Wisata Nelayan dapat digali lebih jauh melalui FGD seluruh elemen masyarakat agar potensi sosial dan kultural masyarakat lokal dapat lebih diangkat secara maksimal dan dikelola oleh BUMDes dan diorganisasikan secara bersama dengan dukungan Camat hingga ke level RT dengan membentuk kelembagaan yang mewakili semua pemangku kepentingan terkait.



Gbr. 3 Pusat Pengembangan Masyarakat

Faktor Penghambat

Dari FGD 15 Januari 2020 yang diikuti oleh penulis dan tim, diketahui terdapat potensi hambatan berupa rebutan lahan parkir dengan preman setempat (konflik kepentingan di level *grass-root*). Hal ini harus diantisipasi dengan penataan tempat parkir yang diperkuat oleh kebijakan camat yang sudah dibicarakan dengan perwakilan masyarakat khususnya Ormas Pemuda untuk pengelolaannya.

Selain itu, dalam jangka menengah akan dibangun infrastruktur berupa jalan layang di sekitar kawasan yang berpotensi terjadinya peralihan lahan. Oleh karena itu perlu segera ditetapkan kawasan dan areal pengembangan Desa Wisata yang diinginkan.

KESIMPULAN

Sebuah program pengembangan kawasan pariwisata oleh Bappeda Kabupaten Tangerang sedang dilaksanakan di Desa Ketapang melalui program Gerbang Mapan. Pada Tahun 2021

ditargetkan selesai dan perlu dilakukan pengembangan kegiatan masyarakat yang menunjang infrastruktur yang telah dibangun tersebut.

Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa dimungkinkan untuk melakukan pengembangan Desa Wisata di Desa Nelayan Ketapang dengan menerapkan prinsip dalam Community Based Tourism dan Blue Economy dengan mempertimbangkan kondisi awal yang sudah cukup baik dalam hal keaktifan pemerintah kecamatan dan penerimaan dan keterlibatan warga masyarakat dan berbagai pihak.

Terdapat faktor pendukung serta penghambat untuk mengembangkan Desa Wisata di Desa Ketapang ini. Dapat dilihat bahwa faktor pendukung lebih besar sehingga pengembangan menjadi Desa Wisata memiliki kemungkinan untuk dapat berhasil.

Beberapa faktor yang perlu diperkuat untuk kesuksesan penerapan CBT di Desa Ketapang antara lain: Komitmen dan Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung seperti insentif bagi UKM, dukungan perlengkapan nelayan, dan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di kawasan serta penguatan SDM nelayan dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Di samping itu terdapat tantangan berupa potensi konflik namun mengingat kondisi awal menunjukkan modal sosial yang cukup baik, maka warga diharapkan akan lebih resilien bila terjadi konflik dan dengan pendekatan berbasis masyarakat yang menekankan pelibatan masyarakat ini diharapkan kegiatan ekonomik yang muncul akan lebih berkelanjutan.

Studi lebih lanjut mengenai strategi dan langkah pengembangan Desa Wisata di Desa Nelayan Ketapang perlu dilakukan dengan pelibatan elemen akademik dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Tangerang khususnya fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif beserta lembaga inkubator bisnisnya yaitu IBU untuk dapat mewujudkan Desa Wisata Nelayan Desa Ketapang, Mauk.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tonazzini, D., Fosse, J., Morales, E., González, A., Klarwein, S., Moukaddem, K., Louveau, O. (2019) Blue Tourism. Towards a sustainable coastal and maritime tourism in world marine regions. Edited by eco-union. Barcelona.
2. <http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/13620/Kabupaten-Tangerang-Rampungkan-Road-Map-Gerbang-Mapan>
3. ASEAN, (2016), ASEAN Community Based Tourism Standard. Jakarta
4. E. Okazaki, (2008), "A Community-Based Tourism Model. It's Conception and Use," Journal of Sustainable Tourism. Vol 16 No. 5.
5. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1566>
6. Pemerintah Kabupaten Tangerang, (2020) Rencana Infrastruktur Ketapang.
7. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/5641/Promosi-Kebudayaan-dan-Pariwisata-Propinsi-Banten-melalui-media-desain-komunikasi-visual>

8. <https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/2010https://republika.co.id/berita/koran/urbana/16/05/25/o7q9473-desa-ketapang-dijadikan-pusat-rehabilitasi-pesisir>
9. <http://buldanbelozoglu.blogspot.com/>
10. [PKSPL IPB, 2019, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Terpadu Kabupaten Tangerang](#)
11. Erika Revida., dkk. Inovasi Desa Wisata: Potensi, Strategi, dan Dampak Kunjungan WIsata. Yayasan Kita Menulis, 2021.
12. Pauli, Gunter. The Blue Economy. Japan Spotlight. January/February, 2011. Link artikel: https://www.jef.or.jp/journal/pdf/175th_cover04.pdf
13. __Notulen Focus Group Discussion. Saung Pak Omat Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. 15 Januari 2020.
14. Artikel: <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Anugerah-Desa-Wisata-Indonesia>